

**ANALISIS TINGKAT PEMANFAATAN FASILITAS DAN
RENCANA PENGEMBANGAN PANGKALAN PENDARATAN
IKAN PONTAP KOTA PALOPO**

**Analysis of facilities utilization level and development plan of the
fish landing base of pontap palopo city**

BASO ASWAR



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2022

**ANALYSIS OF FACILITIES UTILIZATION LEVEL AND
DEVELOPMENT PLAN OF THE FISH LANDING BASE OF PONTAP,
PALOPO CITY**

**Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Dan Rencana Pengembangan
Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap Kota Palopo**

**BASO ASWAR
L012202004**

THESIS

THESIS Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of
Science (M.Si)

**MAGISTER PROGRAM IN FISHERIES SCIENCE
FACULTY OF MARINE SCIENCE AND FISHERIES
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Dan Strategi Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pontap Kota Palopo

Nama Mahasiswa : Baso Aswar


Nomor Pokok : L012202004

Program Studi : Ilmu Perikanan

Tesis ini telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,


Prof. Dr. Ir. Achmar Mallawa, DEA.

NIP. 19511222 197603 1 001


Safruddin, S.Pi., M.P., Ph.D

NIP. 19750611 200312 1 003


Mengetahui,


Dekan
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan

Safruddin, S.Pi., M.P., Ph.D

NIP. 19750611 200312 1 003

Plt. Ketua Program Studi S2
Ilmu Perikanan,


Dr. Fahrul, S.Pi., M.Si

NIP. 19740419 200604 1 001

Tanggal Lulus: 15 November 2022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baso Aswar
NIM : L012202004
Program Studi : Ilmu Perikanan
Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan

Menyatakan bahwa tesis dengan Judul: "Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Dan Rencana Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap Kota Palopo" ini adalah karya penelitian saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis digunakan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendiknas No. 17, tahun 2007).

Makassar, 21 November 2022



Baso Aswar
Nim: L012202004

PERYATAAN KEPEMILIKAN TULISAN

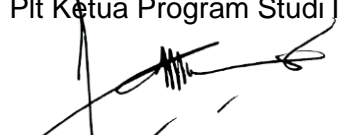
Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Baso Aswar
NIM : L01202004
Program Studi : Ilmu Perikanan
Fakultas : Ilmu Kelautan dan Perikanan

Menyatakan bahwa publikasi sebagian atau keseluruhan isi tesis pada jurnal atau forum ilmiah lain harus seizin dan menyertakan tim pembimbing sebagai pemilik tulisan (*author*) dan Universitas Hasanuddin sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya dua semester (satu tahun sejak pengesahan tesis) saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan tesis ini, maka pembimbing sebagai salah seorang dari penulis berhak mempublikasinya pada jurnal ilmiah yang ditentukan kemudian, sepanjang nama mahasiswa tetap diikutkan.

Makassar, 21 November 2022

Mengetahui,
Plt Ketua Program Studi Ilmu Perikanan,


Dr. Fahrul, S.Pi., M.Si.
NIP. 19740419 200604 1 001

Penulis


Baso Aswar
NIM. L012202004

ABSTRAK

Baso Aswar. L012202004. "Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Dan Rencana Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pontap Kota Palopo". Dibimbing oleh **Achmar Mallawa** sebagai pembimbing utama dan **Safruddin** sebagai pembimbing anggota.

Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap dibangun pada tahun 2005 dengan fasilitas PPI yang tersedia disesuaikan dengan kondisi kebutuhan pada saat itu. Seiring dengan berjalannya waktu, telah terjadi perkembangan yang pesat sektor perikanan di perairan Teluk Bone dan hal ini akan mempengaruhi jumlah ikan yang akan didaratkan di pelabuhan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan kajian keberadaan fasilitas seperti tingkat pemanfaatan fasilitas, strategi pengembangan, dan peningkatan tipe pelabuhan untuk pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pontap untuk memenuhi berbagai aktifitas yang ada di pelabuhan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kondisi dan menganalisis tingkat pemanfaatan fasilitas di PPI Pontap, rencana optimalisasi dan pengembangan kinerja PPI Pontap, dan metode skoring yang digunakan untuk peningkatan status PPI menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Penelitian ini menggunakan metode diskriptif dengan data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Analisis data yang digunakan yaitu mengetahui tingkat pemanfaatan fasilitas dan analisis SWOT untuk menentukan strategi pengembangan untuk menentukan prioritas strategi yang digunakan, serta uji kriteria dari PPI (Tipe D) ke PPP (Tipe C).

Tingkat pemanfaatan fasilitas PPI Pontap seperti fasilitas dermaga melebihi 100%, kolam pelabuhan sudah melebihi 100%, kedalaman perairan (88,33%), daratan pelabuhan (18,15%), SPDN sudah melebihi 100%, penampungan air sudah melebihi 100%, pabrik es (99,98%). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Tingkat pemanfaatan fasilitas yang ada di PPI Pontap penggunaannya sangat tinggi dan ada beberapa fasilitas yang ada di pelabuhan sudah tidak berfungsi.

Strategi Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap pada grand strategy yang terletak di kuadran III yaitu dapat dilakukan dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan peluang yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap untuk menangkap peluang sebesar-besarnya. Berdasarkan matriks SWOT di dapatkan bahwa strategi yang dapat dilakukan oleh PPI Pontap adalah strategi pada kuadran III yaitu strategi W - O (*Weakness – Opportunity*).

Peningkatan tipe pelabuhan ke PPP untuk PPI Pontap berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/MEN/2012 didapatkan bahwa telah memenuhi syarat 89% yang tergolong penggunaannya tinggi sehingga layak untuk di tingkatkan statusnya menjadi PPP Pontap Kota Palopo.

Kata Kunci: PPI Pontap, tingkat pemanfaatan fasilitas, rencana pengembangan, PPP.

ABSTRACT

Baso Aswar. L012202004. Analysis of Facilities Utilization Level and Development Plans of The Fish Landing Base of Pontap, Palopo City. Supervised by Achmar Mallawa as the main supervisor and Safruddin as the member supervisor.

The Fish Landing Base (FLB) of Pontap, Palopo city was built in 2005 where the fish landing base facilities provided were adjusted to the conditions at that time. Over time there has been a rapid development of the fisheries sector in the waters of Bone Bay and this will affect the number of fish. Furthermore, it is necessary to conduct studies such as the level of facility utilization, increasing types, and strategies for developing of the FBL of Pontap to meet various existing activities.

The purpose of this study is to describe the condition and analyze the level of utilization of facilities at FLB of Pontap, and to design a plan for optimization and development of the performance of FLB of Pontap, as well as to examine the status of the FLB to become a Coastal Fishing Port (CFP). This research method is descriptive method with data collected in the form of primary data and secondary data. The analysis used is to analyze the level of facility utilization and the SWOT method to determine the development strategy to determine the priority of the strategy used, as well as test criteria from FLB level (Type D) to become CFP level (Type C).

Utilization rate of the FLB of Pontap facilities was generally quite high, such as the utilization rate found that the dock exceeded 100%, the harbor pool exceeded 100%, the water depth was 88.33%, the mainland port was 18.15%, the Solar Pack Dealer-Fisher exceeded 100%, the water reservoir exceeded 100%, ice factory (99.98%). From these results it can be concluded that the utilization rate of existing facilities at FLB Pontap is very high and there are some supporting facilities that were unfunction.

The FLB strategy in the grand strategy which is located in quadrant III, which can be done by utilizing or optimizing the opportunities that exist in the FLB of Pontap to capture the greatest opportunities. Based on the SWOT matrix, it was found that the strategy that can be carried out by FLB of Pontap is a strategy in quadrant III, namely the W - O (Weakness - Opportunity) strategy.

In increasing the type of port from FLB to CFP level at the FLB of Pontap in accordance with the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries number 08/MEN/2012, it has met the requirements of 89% which is classified as high so that it deserves to be upgraded to the status of CFP of Pontap, Palopo City.

Keywords: FLB of Pontap, facility utilization rate, development plan, CFP.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tesis dengan tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini dilakukan pada bulan februari sampai dengan Juli 2022 ini ialah pelabuhan perikanan, dengan judul "Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas dan Strategi Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap Kota Palopo". Dengan kerendahan hati dan segala hormat penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dengan mendukung dan membimbing Penulis, khususnya kepada:

1. Allah SWT dengan segala rahmat serta karunia-Nya yang memberikan kekuatan bagi peneliti dalam menyelesaikan Tesis ini.
2. Kedua orang tua tercinta **Muksin** dan **Rahayu** yang selama ini telah membantu peneliti dalam bentuk perhatian, kasih sayang, semangat, doa yang tidak henti-hentinya mengalir demi kelancaran dan kesuksesan peneliti dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. Achmar Mallawa, DEA** selaku pembimbing utama dan Bapak **Safuruddin, S.Pi, MP, Ph.D** selaku pembimbing anggota yang telah banyak meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing dan memberikan petunjuk dari awal penelitian hingga selesainya penulisan tesis ini.
4. Ibu **Dr. Ir. Sitti Aisjah farhum, M.Si**, Ibu **Dr. Dr. Esther Sandamanapa, M.T**, dan bapak **Prof. Dr. Ir. Chair Rani, M.Si.**, selaku dosen penguji yang telah memberikan ilmu, masukan saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan tesis.
5. Ibu **Dr. Ir. Siti Aslamyah, MP** selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan
6. Bapak **Dr. Fahrul, S.Pi., M.Si** selaku Plt Ketua Program Studi Magister Ilmu Perikanan.
7. Bapak **Dr. Rachmat Hidayat** yang telah membantu memberikan saran serta semangat dalam penulisan tesis ini.
8. **Seluruh Dosen Pengajar** dan **Staf Pegawai** Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin yang telah bekerja keras dalam memberikan ilmu dan membantu menyelesaikan segala bentuk persuratan berkas-berkas penulis butuhkan.
9. **Pak Reza** selaku staf Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan **Pak Ilham** selaku pengelola PPI Pontap Kota Palopo yang sangat berjasa membantu penulis mulai dari persiapan hingga selesainya kegiatan penelitian ini.

10. **Muhamamad Rafli. S** yang telah menemani dalam melakukan pengambilan data di lokasi penelitian. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
11. Terima kasih untuk Adik-Adikku tersayang, **Muhammad Fajrin** dan **Muhammad Agung**.
12. Teman – teman seperjuangan mahasiswa S2 Ilmu Perikanan angkatan 2020 Semester Genap, kerabat, keluarga, dan semua pihak yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada penulis dari awal perkuliahan hingga proses penyelesaian tesis ini.

Akhir kata, Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat dan memberi sumbangsih untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta segala amal baik serta jasa dari pihak yang membantu Penulis mendapat berkat dan karunia Allah SWT. Aamiin.

Makassar, 21 November 2022



Baso Aswar

RINGKASAN

Baso Aswar. L012202004. "Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Dan Rencana Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap Kota Palopo". Dibimbing oleh ACHMAR MALLAWA dan SAFRUDDIN.

Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap dibangun pada tahun 2005 dengan fasilitas PPI yang tersedia disesuaikan dengan kondisi kebutuhan pada saat itu. Seiring dengan berjalannya waktu, telah terjadi perkembangan yang pesat sektor perikanan di perairan Teluk Bone dalam ini akan mempengaruhi jumlah ikan yang akan didaratkan di pelabuhan. Kekayaan laut ini yang seharusnya dikembangkan dan ditingkatkan melalui pemberdayaan agar tidak terjadinya penurunan pendapatan dan ketimpangan kemiskinan yang tidak sesuai dengan realitas dari potensi yang ada di masyarakat pesisir.

Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan kajian pemanfaatan fasilitas Pelabuhan dan pengembangan PPI Pontap Kota Palopo agar keberadaan PPI tersebut berkontribusi signifikan untuk pembangunan perikanan tangkap di wilayah Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana pengembangan yang tepat diharapkan akan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap berbagai aktivitas yang terdapat di PPI Pontap.

Tujuan dari penelitian ini: (1) Mendeskripsikan kondisi dan menganalisis tingkat pemanfaatan fasilitas pangkalan pendaratan ikan Pontap Kota Palopo. (2) Mengkaji rencana optimalisasi pemanfaatan fasilitas dan pengembangan dalam kinerja PPI Pontap Kota Palopo. (3) Mengkaji peningkatan status PPI Pontap dari tipe D ke tipe C (Pelabuhan Perikanan Pantai).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *survey deskriptif* yang bersifat studi kasus. Analisis data yang digunakan: (1) Analisis *Numeric*. (2) Analisis SWOT (*Strength Weakness Opportunity Threat*). (3) *Matrix Grand Strategy*. (4) Analisis Terhadap Peningkatan Tipe PPI Pontap.

Tingkat pemanfaatan fasilitas PPI Pontap seperti fasilitas dermaga melebihi 100%, kolam pelabuhan sudah melebihi 100%, kedalaman perairan (88,33%), daratan pelabuhan (18,15%) , SPDN sudah melebihi 100%, penampungan air sudah melebihi 100%, pabrik es (99,98%). Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa Tingkat pemanfaatan fasilitas yang ada di PPI Pontap penggunaannya sangat tinggi dan ada beberapa fasilitas yang ada di pelabuhan sudah tidak berfungsi.

Strategi Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap pada grand strategy yang terletak di kuadran III yaitu dapat dilakukan dengan memanfaatkan atau mengoptimalkan peluang yang ada di Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap untuk menangkap peluang sebesar-besarnya. Berdasarkan matriks SWOT di dapatkan bahwa strategi yang dapat dilakukan oleh PPI Pontap adalah strategi pada kuadran III yaitu strategi W - O (*Weakness – Opportunity*).

Peningkatan tipe pelabuhan ke PPP untuk PPI Pontap berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/MEN/2012 didapatkan bahwa telah memenuhi syarat 89% yang tergolong penggunaannya tinggi sehingga layak untuk di tingkatkan statusnya menjadi PPP Pontap Kota Palopo.

SUMMARY

Baso Aswar. L012202004. "Analysis of Facility Utilization Rate and Development Plan of Palopo City Pontap Fish Landing Base". Guided by ACHMAR MALLAWA and SAFRUDDIN.

The Pontap Fish Landing Base was built in 2005 with PPI facilities available adapted to the conditions of needs at the time. Over time, there has been a rapid development of the fishery sector in the waters of Bone Bay in this deep Bone Bay that will affect the number of fish that will be landed in the port. This marine wealth should be developed and improved through empowerment so that there is no decrease in income and inequality that does not match the reality of the potential that exists in coastal communities.

Based on this, it is considered necessary to conduct a study on the utilization of Port facilities and the development of PPI Pontap Palopo City so that the existence of the PPI contributes significantly to the development of capture fisheries in the Bone Bay area and South Sulawesi Province. The right development plan is expected to be able to make an optimal contribution to various activities contained in PPI Pontap.

The aims of this study: (1) To describe the conditions and to analyze the level of utilization of the Pontap fish landing base facilities in Palopo City. (2) Reviewing plans for optimizing the use of facilities and development in the performance of PPI Pontap, Palopo City. (3) Reviewing the upgrading of Pontap PPI status from type D to type C (Coastal Fishery Port).

The method used in this study is a descriptive survey method which is a case study. Analysis of data used: (1) Numeric Analysis. (2) SWOT (Strength Weakness Opportunity Threat) analysis. (3) Matrix Grand Strategy. (4) Analysis of the Increase in PPI Pontap Type.

Utilization rate of the FLB of Pontap facilities was generally quite high, such as the utilization rate found that the dock exceeded 100%, the harbor pool exceeded 100%, the water depth was 88.33%, the mainland port was 18.15%, the Solar Pack Dealer-Fisher exceeded 100%, the water reservoir exceeded 100%, ice factory (99.98%). From these results it can be concluded that the utilization rate of existing facilities at FLB Pontap is very high and there are some supporting facilities that were unfunction.

The FLB strategy in the grand strategy which is located in quadrant III, which can be done by utilizing or optimizing the opportunities that exist in the FLB of Pontap to capture the greatest opportunities. Based on the SWOT matrix, it was found that the strategy that can be carried out by FLB of Pontap is a strategy in quadrant III, namely the W - O (Weakness - Opportunity) strategy.

In increasing the type of port from FLB to CFP level at the FLB of Pontap in accordance with the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries number 08/MEN/2012, it has met the requirements of 89% which is classified as high so that it deserves to be upgraded to the status of CFP of Pontap, Palopo City.

BIODATA PENULIS



Baso Aswar dilahirkan pada tanggal 18 Agustus 1997 di Ponrang dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis merupakan anak dari pasangan bapak Muksin dan ibu Rahayu. Penulis menyelesaikan pendidikan di SDN 60 Ponrang tahun 2009, SMP Negeri 2 Bua Ponrang pada tahun 2012, dan SMA Negeri 2 Bua Ponrang tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis berhasil diterima di Universitas Hasanuddin melalui Jalur Non Subsidi (JNS). Penulis terdaftar pada Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Departemen Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Selama menempuh pendidikan S1, penulis merupakan penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA) Universitas Hasanuddin pada tahun 2019. Selama menjalani perkuliahan penulis juga terdaftar sebagai anggota KMP PSP FIKP UNHAS dan anggota KEMAPI FIKP UNHAS. Penulis pernah menjabat sebagai Koordinator Kesekretariatan KMP PSP FIKP UNHAS, Sekertaris Dewan Pertimbangan Organisasi KMP PSP FIKP UNHAS, Koordinator Dewan Pertimbangan Organisasi KMP PSP FIKP UNHAS, Anggota Departemen Unit Tenis Meja Universitas Hasanuddin, dan Anggota Kabit PPPA Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Perikanan.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|-------------|
| DAFTAR TABEL | xv |
| DAFTAR GAMBAR..... | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xvii |
| I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan..... | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Hipotesis | 6 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| A. Pelabuhan Perikanan | 7 |
| B. Pangkalan Pendaratan Ikan..... | 10 |
| C. Peran dan Fungsi Pelabuhan Perikanan..... | 13 |
| D. Operasional Pelabuhan Perikanan | 14 |
| E. Fasilitas Pelabuhan Perikanan..... | 15 |
| 1. Fasilitas Pokok..... | 15 |
| 2. Fasilitas Fungsional | 17 |
| 3. Fasilitas Penunjang..... | 17 |
| F. Pengembangan Pelabuhan Perikanan..... | 18 |
| G. Analisis <i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats</i> (SWOT)..... | 20 |
| H. Kerangka Pikir. | 22 |
| I. Kajian Penelitian Terdahulu | 23 |
| III. METODOLOGI PENELITIAN..... | 24 |
| A. Waktu dan Lokasi Penelitian..... | 24 |
| B. Alat dan Bahan | 24 |
| C. Metode dan Jenis Pengumpulan Data | 25 |
| 1. Metode Penelitian | 25 |
| 2. Jenis Pengumpulan Data | 25 |
| D. Prosedur Penelitian dan Rancangan Penelitian | 26 |
| E. Analisis Data..... | 26 |
| 1. Analisis <i>Numeric</i> | 27 |
| 2. Analisis SWOT..... | 31 |
| 3. Analisis Matriks <i>Grand Strategy</i> | 33 |
| 4. Analisis Terhadap Peningkatan Status PPI Pontap..... | |

| | |
|--|-----------|
| IV. HASIL | 37 |
| A. Keadaan Umum PPI Pontap Kota Palopo. | 37 |
| 1. Alat Tangkap PPI Pontap. | 38 |
| 2. Produksi Hasil Tangkapan..... | 38 |
| 3. Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap. | 39 |
| B. Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap Kota Palopo. | 50 |
| C. Analisis SWOT Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap..... | 52 |
| D. Penentuan <i>Grand Strategy</i> | 53 |
| E. Analisis Kriteria Teknis Dan Operasional terhadap Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap | 57 |
| V. PEMBAHASAN..... | 60 |
| A. Keadaan Umum PPI Pontap Kota Palopo..... | 60 |
| B. Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap. | 61 |
| C. Analisis SWOT Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap..... | 67 |
| D. Matriks <i>Grand Strategy</i> Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap | 68 |
| E. Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap | 79 |
| VI. KESIMPULAN DAN SARAN..... | 71 |
| A. Kesimpulan..... | 71 |
| B. Saran..... | 72 |
| DAFTAR PUSTAKA | 73 |
| LAMPIRAN | 79 |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|----------------|
| 1. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan..... | 10 |
| 2. Matriks SWOT. | 21 |
| 3. Alat dan Bahan..... | 24 |
| 4. Pengguna dan Penggunaan Air Bersih di Pelabuhan. | 29 |
| 5. Penilaian Tingkat Pemanfaatan Pelabuhan Perikanan. | 31 |
| 6. Analisis terhadap Peningkatan Tipe PPI Pontap..... | 32 |
| 7. Armada Penangkapan Ikan di PPI Pontap..... | 37 |
| 8. Produksi Hasil Tangkapan Tahun 2021 PPI Pontap Kota Palopo. | 38 |
| 9. Produksi Hasil Tangkapan Tahun 2017 -2021 PPI Pontap Kota Palopo. | 38 |
| 10. Fasilitas Pokok PPI Pontap Kota Palopo. | 39 |
| 11. Fasilitas Fungsional PPI Pontap Kota Palopo..... | 41 |
| 12. Fasilitas Penunjang PPI Pontap Kota Palopo. | 46 |
| 13. Matriks SWOT. | 55 |
| 14. Skoring Faktor Internal. | 56 |
| 15. Skoring Faktor Eksternal. | 56 |
| 16. Perbandingan Pelabuhan Perikanan Tipe C dengan Klasifikasi Pelabuhan Perikanan Tipe B..... | 58 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|----------------|
| 1. Kerangka Pikir Penelitian..... | 22 |
| 2. Lokasi Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap Palopo. | 24 |
| 3. Matriks Grand Strategy..... | 33 |
| 4. Layout PPI Pontap Kota Palopo | 37 |
| 5. Fasilitas Dermaga Ppi Pontap. | 41 |
| 6. Fasilitas Kolam Pelabuhan PPI Pontap | 41 |
| 7. Fasilitas Jalan Kompleks PPI Pontap | 42 |
| 8. Fasilitas Daratan Pelabuhan PPI Pontap..... | 42 |
| 9. Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan Ppi Pontap..... | 43 |
| 10. Fasilitas Bangunan Pabrik Es PPI Pontap | 43 |
| 11. Fasilitas Bangunan <i>Coldstorage</i> PPI Pontap | 44 |
| 12. Fasilitas SPDN Ppi Pontap | 45 |
| 13. Fasilitas Tangka Air PPI Pontap | 45 |
| 14. Fasilitas <i>Docking</i> PPI Pontap | 46 |
| 15. Fasilitas Gedung Pengolahan PPI Pontap..... | 47 |
| 16. Fasilitas Kantor Pengelolah PPI Pontap | 47 |
| 17. Fasilitas Balai Pertemuan Nelayan Ppi Pontap..... | 48 |
| 18. Fasilitas Pos Masuk PPI Pontap | 48 |
| 19. Fasilitas Pos Jaga PPI Pontap..... | 49 |
| 20. Fasilitas Mushallah PPI Pontap | 49 |
| 21. Fasilitas Kios PPI Pontap | 50 |
| 22. Fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK) PPI Pontap..... | 50 |
| 23. Matriks <i>Grand Strategy</i> | 57 |
| 24. Strategi Penambahan Lahan Pada PPI Pontap | 59 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|--|----------------|
| 1. Analisis Perhitungan Tingkat Pemanfaatan Dermaga PPI Pontap. | 79 |
| 2. Analisis perhitungan tingkat pemanfaatan kolam Pelabuhan. | 80 |
| 3. Analisis perhitungan tingkat pemanfaatan kedalaman perairan. | 82 |
| 4. Analisis Perhitungan Tingkat Pemanfaatan Daratan Pelabuhan. | 83 |
| 5. Analisis Perhitungan Tingkat Pemanfaatan Gedung Pelelangan. | 84 |
| 6. Analisis perhitungan Tingkat pemanfaatan BBM Solar Paket Diesel Nelayan.. | 84 |
| 7. Analisis Perhitungan Tingkat Pemanfaatan Pabrik Es. | 85 |
| 8. Analisis perhitungan Tingkat Pemanfaatan air bersih. | 86 |
| 9. Fasilitas-fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap Kota Palopo. | 87 |
| 10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 / MEN / 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan..... | 88 |
| 11. Dokumentasi..... | .107 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta km² (terdiri dari luas laut teritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas Zona EKonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) sebesar 2,55 juta km²) dan memiliki potensi sumber daya ikan yang melimpah. Anugerah tersebut dapat dijadikan sebagai modal strategis bagi pembangunan ekonomi nasional dengan reorientasi paradigma pembangunan dari pembangunan berbasis daratan menjadi pembangunan berbasis kelautan dan kepulauan, melalui perwujudan bangsa yang berkepribadian dan berkebudayaan maritim, dengan menempatkan maritim sebagai poros kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan petani ikan (Renstra KKP 2020 - 2024).

Kekayaan alam tersebut menjadi salah satu modal dasar yang harus dikelola dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEEI, berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMEN-KP/2017 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 6,98 juta ton pada tahun 2019 atau baru 69,59% dari JTB, sementara total produksi perikanan (di laut dan perairan darat) adalah 7,53 juta ton. Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum tereksplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa depan.

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 713 (WPP-NRI 713) merupakan salah satu wilayah pengelolaan perikanan di Indonesia yang meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores, dan Laut Bali yang termasuk perairan yang kaya akan potensi sumber daya ikan dan merupakan daerah penangkapan ikan yang penting di Indonesia, terutama untuk kelompok sumber daya ikan-ikan pelagis kecil, pelagis besar, demersal, dan ikan karang konsumsi. Pada hakekatnya, pengelolaan perikanan merupakan pengelolaan sumber daya perikanan yang termasuk di dalamnya pengelolaan ikan beserta ekosistem di dalamnya.

Suman *et al.*, (2014) menyatakan bahwa sumber daya ikan di WPPNRI tergolong sumber daya ikan perairan tropis yang dicirikan oleh multi spesies yang dapat dikelompokkan ke dalam 9 kelompok jenis ikan, yaitu: pelagis besar, pelagis kecil, demersal, ikan karang, udang penaeid, lobster, kepiting, rajungan, dan cumi-cumi. WPPNRI 713 termasuk perairan yang kaya akan potensi sumber daya ikan dan merupakan daerah penangkapan ikan yang penting di Indonesia, terutama untuk kelompok sumber daya ikan-ikan pelagis kecil, pelagis besar, demersal, dan ikan karang konsumsi. Pada hakekatnya, pengelolaan perikanan merupakan pengelolaan sumber daya perikanan yang termasuk di dalamnya pengelolaan ikan beserta ekosistem di dalamnya dan manusia yang memanfaatkan sumber daya tersebut untuk kebutuhan penghidupannya.

Keberhasilan pengembangan sektor perikanan tidak terlepas dari dukungan prasarana pendukungnya dimana dalam hal ini adalah pelabuhan perikanan merupakan interface (penghubung) antara aktivitas perikanan di laut (penangkapan) dengan aktivitas perikanan di darat (pengolahan dan pemasaran), dan disamping itu pelabuhan perikanan merupakan tempat penyediaan bahan perbekalan, perbengkelan, pengolahan hasil tangkapan dan lain-lain. Hal ini dapat dilihat secara nyata bahwa keberhasilan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan dapat menimbulkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan kata lain Pelabuhan Perikanan dapat memajukan ekonomi disuatu wilayah dan sekaligus dapat meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan asli daerah (Yuspardianto, 2006).

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Palopo terbentuk berdasarkan peraturan daerah No. 8 Tahun 2016, tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah yang sebelumnya berbunyi dinas kelautan dan perikanan. Kemudian terbitlah peraturan walikota No.28 Tahun 2016 tentang struktur organisasi. Tugas dan fungsi serta tata kerja dinas perikanan Kota Palopo sebagai turunan dari peraturan daerah di atas tersebut.

Usaha pembangunan sektor perikanan memerlukan strategi yang inovatif. Salah satu daerah yang sedang mengembangkan sektor perikanan adalah Kota Palopo. Kota Palopo memiliki potensi laut yang cukup besar sehingga salah satu mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai nelayan. Selain itu, di Kota Palopo telah banyak berkembang usaha kecil yang juga telah menjadi mata pencaharian masyarakat setempat yang dilakukan oleh ibu rumah tangga. Hasil laut kota Palopo yang di daratkan di PPI Pontap diantaranya yaitu ikan teri 1.076,3 ton, ikan belanak 384,1 ton, ikan bentong 1.602,4 ton, ikan banjar 281,3 ton, ikan kembung 2.193,3 ton, ikan layang anggur/malulugis 740,4 ton, ikan selar komo 1.714,9 ton, ikan tembang 874,3 ton, ikan cakalang 784,7 ton, ikan tenggiri 723,3 ton, ikan kakap putih 278,3 ton, ikan tongkol abu-abu 85,4 ton, ikan cucut selndang 14,8 ton, ikan manyung 134,3 ton, ikan pinjolo 119,9

ton, ikan kurisi 332,2 ton, ikan biji angka 3,1 ton, ikan layur 80,4 ton, ikan pari kembang/pari macan 6,2 ton, ikan beloso/buntut kebo 182,7 ton, ikan tatengke 89,6 ton, ikan rejung 50,0 ton ikan lele 30,6 ton, ikan baronang 210,6 ton. dan masih banyak lagi hasil laut lainnya seperti kepiting 47,6 ton, udang 825,3 ton, cumi-cumi 109,9 ton (Laporan Tahunan Dinas Perikanan Kota Palopo, 2019).

Kekayaan laut ini yang seharusnya dikembangkan dan ditingkatkan melalui pemberdayaan agar tidak terjadinya penurunan pendapatan dan ketimpangan kemiskinan yang tidak sesuai dengan realitas dari potensi yang ada di masyarakat pesisir. Selain itu, diharapkan dengan adanya suatu pemberdayaan terhadap masyarakat pesisir dapat meningkatkan pendapatan nelayan itu sendiri terlebih kepada pendapatan tahunan oleh pemerintah setempat yang nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah pusat dalam pemberian anggaran dana berupa bantuan.

Dalam rangka pemanfaatan sumberdaya perikanan secara optimal dan berkelanjutan maka diperlukan keberadaan pelabuhan perikanan. Menurut UU No. 45 tahun 2009 pasal 3, pembangunan perikanan bertujuan yaitu (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidayaan ikan; (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara; (3) mendorong perluasan dan kesempatan kerja; (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein hewani; (5) mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan; (6) meningkatkan produktifitas mutu, nilai tambah dan daya saing; (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan; (8) pemanfaatan sumberdaya perikanan secara optimal; (9) menjamin kelestarian sumberdaya ikan, dan lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Untuk mengetahui optimalisasi pemanfaatan suatu pelabuhan perikanan adalah dengan cara mengamati fasilitas-fasilitas yang terdapat pada pelabuhan perikanan, yaitu fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang, dan bagaimana fasilitas-fasilitas tersebut dimanfaatkan lebih optimal dan cara pengelolaannya, serta program apa saja yang akan dilaksanakan kedepannya, dan seberapa jauh tingkat pemanfaatan fasilitas-fasilitas tersebut (Yahya dan Suherman, 2013).

Untuk mencapai tujuan pembangunan perikanan tersebut salah satu hal yang paling penting diperhatikan adalah pembangunan sarana dan prasarana perikanan. Khusus untuk perikanan tangkap sarana dan prasarana yang dimaksud adalah "Pelabuhan Perikanan" yang berfungsi sebagai sarana penunjang peningkatan produksi. Mengingat betapa pentingnya pembangunan pelabuhan perikanan maka di dalam Undang-Undang Perikanan dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban membangunnya, dan telah direalisasikan di berbagai tempat di Indonesia.

Pelabuhan Perikanan memiliki peranan strategis dalam pengembangan perikanan dan kelautan, yaitu sebagai pusat atau sentral kegiatan perikanan laut.

Pelabuhan Perikanan selain merupakan penghubung antara nelayan dengan pengguna-pengguna hasil tangkapan, baik pengguna langsung maupun tak langsung seperti: pedagang, pabrik pengolah, restoran dan juga merupakan tempat berinteraksinya berbagai kepentingan masyarakat pantai yang bertempat di sekitar Pelabuhan Perikanan (Kusyanto *et al.*, 2006).

Salah satu pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan ikan di Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di wilayah Teluk Bone bagian Utara dan paling sering dijadikan sebagai tempat bongkar muat hasil perikanan adalah Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap di Kota Palopo. Hal ini dikarenakan fasilitas yang disediakan di PPI tersebut lebih lengkap dan lebih baik dari PPI lainnya (Suardi, 2005). Selain itu juga disebabkan potensi sumberdaya ikan laut di wilayah Teluk Bone bagian Utara sangat melimpah yang sangat mendukung keberadaan pelabuhan perikanan yang ada.

Menurut Widiastuti (2010) penilaian kinerja adalah sebuah gambaran/ deskripsi sistematis tentang kekuatan dan kelemahan yang terkait dengan pekerjaan dari seseorang atau satu kelompok. Penilaian kinerja menjadi hal yang penting dalam manajemen program secara keseluruhan, karena kinerja yang dapat diukur akan mendorong pencapaian kinerja tersebut. Penilaian kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik, yang merupakan hal yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus dan mencapai keberhasilan di masa mendatang.

Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap merupakan PPI yang digunakan untuk melayani aktivitas pendaratan dan penjualan hasil-hasil tangkapan nelayan yang berada di perairan Teluk Bone bagian Utara yang meliputi wilayah Kota Palopo dan sekitarnya (Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu).

PPI Pontap dibangun pada tahun 2005 di mana fasilitas PPI yang diadakan disesuaikan dengan kondisi saat itu. Seiring dengan berjalannya waktu telah terjadi perkembangan yang pesat sektor perikanan di perairan Teluk Bone dan hal ini akan mempengaruhi jumlah ikan yang didaratkan, jumlah dan ukuran kapal yang berlabuh dan hal ini akan berpengaruh terhadap panjang dermaga, luas kolam pelabuhan, kedalaman alur keluar masuk, luas gedung pelelangan, kebutuhan es, air bersih dan BBM dan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dipandang perlu untuk melakukan kajian pemanfaatan fasilitas Pelabuhan dan pengembangan PPI Pontap Kota Palopo agar keberadaan PPI tersebut berkontribusi signifikan untuk pembangunan perikanan tangkap di wilayah Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana pengembangan yang tepat diharapkan akan mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap berbagai aktivitas yang terdapat di PPI Pontap.

B. Rumusan Masalah

Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap Kota Palopo dilengkapi dengan fasilitas pokok, fungsional, dan fasilitas penunjang yang dapat melayani aktifitas perikanan tangkap di wilayah Kota Palopo. Dimana terdapat beberapa fasilitas sudah tidak memenuhi atau melebihi kapasitas yang ditentukan pada beberapa tahun terakhir sehingga diduga sudah tidak memadai dibandingkan kebutuhan saat ini.

Status PPI Pontap belum diserahkan sepenuhnya dari Pemerintah Kota Palopo ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sehingga pengembangan PPI Pontap tidak dapat optimal. Adanya peningkatan jumlah kapal perikanan yang bersandar di PPI Pontap berakibat fasilitas pelabuhan berupa dermaga sudah sangat kurang memadai. Sehingga dapat menghambat bongkar muat, perbekalan dan pelelangan pada PPI Pontap.

Berdasarkan hal tersebut maka pada penelitian ini diangkat tiga permasalahan yaitu:

1. Bagaimana kondisi dan tingkat pemanfaatan fasilitas pangkalan pendaratan ikan Pontap Kota Palopo?.
2. Bagaimana strategi pengembangan dan pengelolaan pelabuhan yang berkaitan dengan pengembangan PPI Pontap?.
3. Apakah PPI Pontap dapat ditingkatkan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (tipe C)?.

C. Tujuan

Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kondisi dan menganalisis tingkat pemanfaatan fasilitas pangkalan pendaratan ikan Pontap Kota Palopo.
2. Mengkaji rencana optimalisasi pemanfaatan fasilitas dan pengembangan dalam kinerja PPI Pontap Kota Palopo.
3. Mengkaji peningkatan status PPI Pontap dari tipe D ke tipe C (Pelabuhan Perikanan Pantai).

D. Manfaat Penelitian

Tersedianya data dan informasi tentang tingkat pemanfaatan fasilitas pelabuhan (fasilitas pokok, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang) dan rencana pengembangan bahan informasi bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dalam pembangunan khususnya pengembangan kinerja Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap. Selain itu sebagai informasi ilmiah tentang pelabuhan perikanan Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

E. Hipotesis

1. Tingkat pemanfaatan fasilitas pada Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap sudah maksimal karena keberadaan fasilitas Pelabuhan yang ada sudah tidak mendukung secara optimal kegiatan perikanan yang berlangsung di PPI Pontap Kota Palopo.
2. Rencana pengembangan fasilitas dan Pengelolaan PPI Pontap untuk meningkatkan fungsi pelabuhan perikanan adalah dengan melibatkan berbagai stakeholder yang ada (Pemerintah Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan, Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh pelaku perikanan yang beraktivitas di PPI).
3. Pangkalan Pendaratan Ikan Pontap dapat ditingkatkan status tipenya dari PPI (tipe D) ke PPP (tipe C).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan dalam bahasa mempunyai dua pengertian yaitu *harbour* dan *port*. *Harbour* adalah suatu tempat dipinggir laut yang dapat digunakan untuk berlabuh dengan aman bagi kapal-kapal, karena kapal-kapal terlindung dari angin laut. *Port* adalah suatu tempat untuk membongkar dan memuat barang atau penumpang dari kapal-kapal yang datang dan dikenal sebagai kegiatan maritim dan di kelolah oleh otoritas pemerintah. Sedangkan pelabuhan perikanan adalah pelabuhan yang secara khusus menampung kegiatan masyarakat perikanan baik dilihat dari aspek produksi, pengolahan maupun pemasaran (Murdianto, 2004).

Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Pasal 1, Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Pelabuhan perikanan adalah suatu wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan lautan yang digunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas sejak ikan didaratkan sampai ikan didistribusikan (Lubis, 2012).

Secara teknis pelabuhan perikanan adalah salah satu bagian ilmu bangunan maritim, dimana dimungkinkan kapal-kapal berlabuh atau bersandar kemudian dilakukan bongkar muat (Kramadibrata, 2002). Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pelabuhan perikanan merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan ditinjau dari pengolahan dan pemasaran, baik berskala lokal, nasional maupun berskala internasional. Kurniawan (2001) bahwa aspek-aspek tersebut secara terperinci adalah:

- a. Produksi: bahwa pelabuhan perikanan sebagai tempat para nelayan untuk melakukan kegiatan-kegiatan produksinya, mulai dari memenuhi kebutuhan.
- b. Perbekalan untuk menangkap ikan di laut sampai membongkar hasil tangkapannya.
- c. Pengolahan: bahwa pelabuhan perikanan menyediakan sarana-sarana yang dibutuhkan untuk mengolah hasil tangkapannya.
- d. Pemasaran: bahwa pelabuhan perikanan merupakan pusat pengumpulan dan pemasaran hasil tangkapannya.

Berdasarkan Kep No. 31 Tahun 2012 tentang Pelabuhan perikanan, maka pelabuhan perikanan diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pelabuhan perikanan samudra (PPN/Tipe A)
- b. Pelabuhan perikanan nusantara (PPN/Tipe B)

- c. Pelabuhan perikanan pantai (PPP/Tipe C)
- d. Pangkalan pendaratan ikan (PPI/Tipe D).

Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Surat Keputusan Nomor Kep.8/MEN/2012 tentang pelabuhan perikanan membagi pelabuhan perikanan menjadi (pasal 6) :

- a. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS).

Pelabuhan perikanan samudera merupakan pelabuhan perikanan tipe A, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif Indonesia dan wilayah perairan internasional.

- b. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN).

Pelabuhan perikanan nusantara masuk kategori tipe B, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI).

- c. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP).

Pelabuhan perikanan pantai masuk kategori tipe C, yang skala layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah pantai dan laut teritorial, dan bisa sampai ke wilayah laut ZEEI.

- d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Pangkalan pendaratan ikan masuk kategori tipe D, yang skala layanannya mencakup kegiatan usaha perikanan di wilayah perairan pedalaman, perairan pantai dan perairan teritorial.

Menurut Murdiyanto (2004), klasifikasi besar-kecil usahanya pelabuhan perikanan dibedakan menjadi 4 tipe pelabuhan, yaitu:

- a. Pelabuhan Perikanan Tipe A (Pelabuhan Perikanan Samudera)

Pelabuhan perikanan tipe ini adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan samudera yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan perairan internasional, mempunyai perlengkapan untuk menangani (handling) dan mengolah sumber daya ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang didaratkan. Adapun jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 200 ton/hari atau 73.000 ton/tahun baik untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri (ekspor). Pelabuhan perikanan tipe A kapal ini dirancang untuk bisa menampung kapal berukuran lebih besar daripada 60 GT (gross tonage) sebanyak sampai dengan 100 unit kapal sekaligus. Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 30 Ha (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 / MEN / 2012).

b. Pelabuhan Perikanan Tipe B (Pelabuhan Perikanan Nusantara)

Pelabuhan perikanan tipe ini adalah pelabuhan perikanan yang diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan nusantara yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai ke perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia), mempunyai perlengkapan untuk menangani (*handling*) dan mengolah sumber daya ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang didaratkan. Adapun jumlah ikan yang didaratkan minimum sebanyak 50 ton/hari atau 18.250 ton/tahun baik untuk 9 pemasaran di dalam negeri. Pelabuhan perikanan tipe B ini dirancang untuk bisa menampung kapal berukuran lebih besar dari pada 60 GT sebanyak sampai dengan 50 unit kapal sekaligus. Mempunyai cadangan lahan untuk pengembangan seluas 10 Ha. (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 / MEN / 2012).

c. Pelabuhan Perikanan Tipe C (Pelabuhan Perikanan Pantai)

Pelabuhan perikanan tipe ini adalah pelabuhan perikanan yang dapat menampung kapal-kapal nelayan yang berukuran 15 GT sebanyak 25 unit sekaligus, dengan produksi ikan sebanyak 20 ton/hari dan mempunyai perlengkapan untuk mengolah hasil tangkapan. Untuk pembangunan PPP di rencanakan cadangan lahan pengembangan seluas 5 Ha (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 / MEN / 2012).

d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tipe D

Pangkalan pendaratan ikan dimaksudkan sebagai sarana dan prasarana pendaratan ikan yang dapat menangani produksi ikan sampai dengan 5 ton/hari, dapat menampung kapal perikanan sampai dengan ukuran 5 GT sejumlah 15 unit sekaligus. Untuk pembangunan PPI ini diberikan lahan darat untuk pengembangan seluas 1 Ha (Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 / MEN / 2012).

Pengklasifikasian pelabuhan perikanan pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai parameter (Lubis, 2012), antara lain:

- a. Luas lahan, letak, dan jenis konstruksi bangunannya
- b. Tipe dan ukuran kapal-kapal yang masuk pelabuhan.
- c. Jenis perikanan dan skala usahanya.
- d. Distribusi dan tujuan ikan hasil tangkapan.

Pelabuhan perikanan menurut letak dan tipe konstruksi bangunan, dibagi menjadi (Lubis, 2012), antara lain:

- a. Pelabuhan perikanan alam
- b. Pelabuhan perikanan buatan
- c. Pelabuhan perikanan semalam.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 / MEN / 2012 tentang kepelabuhan perikanan dinyatakan bahwa adanya klasifikasi antara pangkalan pendaratan ikan (tipe D) dan pelabuhan perikanan pantai (tipe C) adalah:

Tabel 1. Klasifikasi Pelabuhan Perikanan

| No. | Kriteria | Pangkalan Pendaratan Ikan (Tipe D) | Pelabuhan Perikanan Pantai (Tipe C) |
|-----|------------------------|---|--|
| 1. | Daerah Penangkapan | Perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial | Perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial |
| 2. | Fasilitas Tambat Labuh | Memiliki fasilitas tambat labuh berukuran sekurang-kurangnya 5 Gross Tonnage (GT) | Memiliki fasilitas tambat labuh berukuran sekurang-kurangnya 10 Gross Tonnage (GT) |
| 3. | Dermaga | Panjang Dermaga sekurang-kurangnya 50 m | Panjang Dermaga sekurang-kurangnya 100 m |
| 4. | Kolam Pelabuhan | Mampu menampung sekurang-kurangnya 15 unit kapal atau 75 GT dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya 1 m | Mampu menampung sekurang-kurangnya 30 unit kapal atau 300 GT dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya 2 m |
| 5. | Produksi | Jumlah ikan yang didaratkan rata-rata 2 ton/hari | Jumlah ikan yang didaratkan rata-rata 5 ton/hari |
| 6. | Luas Lahan | Luas lahan sekurang-kurangnya 1 Ha | Luas lahan sekurang-kurangnya 5 Ha |
| 7. | Industri Perikanan | Terdapat industri Perikanan | Terdapat industri Perikanan |

Sumber: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08/MEN/2012.

B. Pangkalan Pendaratan Ikan

Pangkalan pendaratan ikan yang merupakan pelabuhan perikanan pantai memiliki kriteria sebagai berikut;

- a. Melayani kapal perikanan di wilayah perairan pedalaman dan perairan kepulauan.
- b. Memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan berukuran sekurang-kurang 10 GT.
- c. Panjang dermaga sekurang-kurangnya 50 m, dengan kedalaman kolam sekurang-kurangnya 2 m.
- d. Mampu menampung sekurang-kurangnya 20 kapal perikanan atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 60 GT kapal perikanan sekaligus.
- e. Memiliki lahan sekurang-kurangnya seluas 2 Ha.

Sepertinya halnya pelabuhan secara umum, maka pelabuhan perikanan juga

dapat diklasifikasikan yaitu menurut letak dan jenis usaha perikananannya. Menurut Lubis (2002), pelabuhan perikanan bisa dilihat dari banyaknya faktor yang ada, pengklasifikasiannya dapat dipengaruhi oleh berbagai parameter, antara lain;

- a. Luas lahan, letak dan jenis konstruksi bangunannya.
- b. Tipe dan ukuran kapal-kapal yang masuk pelabuhan.
- c. Jenis perikanan dan skala usaha.
- d. Distribusi dan tujuan ikan hasil tangkapan.

Pelabuhan perikanan menurut tipe konstruksi bangunan, dibedakan menjadi:

- a. Pelabuhan alam, adalah suatu daerah yang menjorok ke dalam, terlindung oleh suatu pulau, jazirah atau terletak di suatu teluk sehingga kapal dapat bernavigasi dan berlabuh.
- b. Pelabuhan buatan, adalah suatu daerah perairan hasil bentukan manusia agar terlindung dari ombak/badai/arus, sehingga memungkinkan kapal untuk merapat.
- c. Pelabuhan semi alam, adalah pelabuhan yang sifatnya juga pelabuhan alam atau pelabuhan buatan.

Pelabuhan perikanan berdasarkan jenis dan skala usaha perikananannya, dibedakan menjadi;

- a. Pelabuhan perikanan berskala besar atau pelabuhan perikanan laut dalam, yaitu pelabuhan untuk perikanan industri atau untuk berlabuh/bersandarnya kapal-kapal penangkapan berukuran besar dengan ukuran panjang antara 40 sampai 120 meter, berat > 50 GT. Mempunyai kolam pelabuhan yang dalam dan dermaga yang panjang. Di pelabuhan ini terdapat juga perusahaan-perusahaan pengolahan dan perdagangan-perdagangan besar. Hasil tangkapan yang didaratkan didistribusikan untuk tujuan nasional maupun internasional.
- b. Pelabuhan perikanan berskala menengah, yaitu pelabuhan untuk perikanan semi industri, dan merupakan tempat berlabuh dan bertambatnya kapal-kapal penangkapan ikan berukuran antara 15 sampai 50 GT. Di pelabuhan ini terkadang terdapat juga perusahaan-perusahaan pengolahan, sementara hasil tangkapannya bertujuan untuk konsumsi nasional dan sedikit untuk konsumsi lokal.
- c. Pelabuhan perikanan berskala kecil atau pelabuhan pantai, yaitu pelabuhan untuk perikanan kecil atau perikanan tradisional atau tempat berlabuh dan bertambatnya kapal-kapal penangkapan berukuran < 15 GT. Pelabuhan ini mempunyai kolam pelabuhan yang tidak terlalu dalam. Umumnya hasil tangkapan yang didaratkan adalah dalam bentuk segar atau dipertahankan kesegarannya dengan menambahkan es. Hasil tangkapan diperuntukan terutama untuk pemasaran lokal.

Pelabuhan perikanan berdasarkan daerah operasi penangkapan, dibedakan menjadi:

- a. Pelabuhan perikanan laut lepas, yaitu pelabuhan tempat berlabuh atau bersandarnya kapal-kapal ikan yang melakukan penangkapan di laut lepas atau di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).
- b. Pelabuhan perikanan lepas pantai, yaitu pelabuhan tempat berlabuh atau bersandarnya kapal-kapal ikan yang melakukan penangkapan di perairan lepas pantai atau di perairan nusantara.
- c. Pelabuhan perikanan pantai, yaitu pelabuhan tempat berlabuh atau bersandarnya kapal-kapal ikan yang melakukan penangkapan di perairan pantai.

Pelabuhan perikanan berdasarkan asal dan tujuan hasil tangkapan, dibedakan menjadi:

- a. Pelabuhan laut, yaitu pelabuhan yang terbuka untuk jenis perdagangan dalam dan luar negeri.
- b. Pelabuhan pantai, yaitu pelabuhan yang terbuka untuk jenis perdagangan dalam negeri.
- c. Pelabuhan sungai, yaitu pelabuhan yang cenderung untuk perdagangan antar daerah yang dihubungkan oleh sungai.

Pengklasifikasian pelabuhan perikanan seperti tersebut di atas pada dasarnya untuk mempermudah pengelolaan khususnya dan pengembangan pelabuhan pada umumnya.

Pangkalan pendaratan ikan pontap yang terletak di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, dibangun pada tahun 2005 memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pusat pengembangan masyarakat nelayan dan pertumbuhan ekonomi nelayan.
 - a. Tempat berlabuhnya kapal-kapal perikanan dan kegiatan-kegiatannya.
 - b. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan para nelayan.
 - c. Pusat penanganan dan pengelolaan hasil perikanan.
 - d. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan.
 - e. Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan.
 - f. Pusat penyuluhan dan pengumpulan data pusat pengawasan penangkapan ikan dan pengendalian sumberdaya ikan.

C. Peran dan Fungsi Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi yang bersifat umum (*general function*). Beberapa fungsi umum merupakan tugas pokok melindungi kapal dan pelayaran lainnya yang hanya dapat dilakukan di setiap pelabuhan perikanan yang bukan untuk kegiatan perikanan. Fungsi khusus merupakan tugas pelayaran di pelabuhan perikanan

membedakan pelabuhan perikanan dari pelabuhan laian yang bukan pelabuhan perikanan. Fungsi khusus ini terutama yang diturunkan dari karakteristik komoditas perikanan yang sifatnya mudah busuk (*highly perishable*). Sifat mudah busuk ini menghendaki pelayanan khusus berupa perlakuan penanganan, pendistribusian hasil ikan secara cepat ataupun pengolahan (*fish processing*). Pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan darat dalam suatu sistem usaha dan berdayaguna tinggi (Murdiyanto, 2004).

Menurut Lubis (2012), pelabuhan perikanan memiliki fungsi dan peranan terhadap perikanan laut, karena pelabuhan perikanan merupakan pusat perekonomian, mulai ketika ikan selesai ditangkap dari *fishing ground*-nya sampai ikan dipasarkan lebih lanjut. Hal tersebut mendorong keberadaan industri perikanan di pelabuhan perikanan, tidak hanya berskala lokal tetapi juga regional dan internasional. Fungsi utama pelabuhan perikanan berkaitan dengan pelayanan jasa-jasa bagi:

- a. Kapal-kapal yang telah selesai menangkap ikan dari daerah penangkapan antara lain adanya fasilitas pendaratan ikan yang aman dan pemeliharaan kapal.
- b. Hasil tangkapan yang telah didaratkan di pelabuhan perikanan antara lain adanya kegiatan pembongkaran, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan.
- c. Pengembangan industri perikanan yang berada dilingkungan pelabuhan perikanan.

Menurut Murdiyanto (2004), pelabuhan perikanan merupakan basis utama kegiatan industri perikanan tangkap yang harus dapat menjamin suksesnya aktivitas usaha perikanan tangkap di laut. Pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha yang berdaya guna tinggi. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Per. 16/Men/2006, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran.

Berdasarkan pasal 41 ayat 1 UU No.45/2009 tentang Perikanan, bahwa pelabuhan perikanan berfungsi sebagai:

- a. Tempat tambat labuh kapal perikanan.
- b. Tempat pendaratan ikan.
- c. Tempat pemasaran dan distribusi ikan.
- d. Tempat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan
- e. Tempat pengumpulan data tangkapan
- f. Tempat penyuluhan serta pengembangan masyarakat nelayan
- g. Tempat untuk memperlancar kegiatan operasional kapal perikanan.

Selanjutnya menurut Kusyanto (2005), untuk menjamin harga ikan dapat menguntungkan nelayan kewajiban Pemerintah membantu nelayan dalam memasarkan ikan melalui sistem lelang. Maksud dari sistem lelang adalah membantu nelayan menjual ikan untuk mendapatkan harga yang optimal pada suatu tempat tertentu kepada sejumlah pembeli melalui cara lelang. Di lain pihak fungsi pembinaan mutu dan pengolahan dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah produk perikanan sehingga akan menimbulkan dampak ganda baik terhadap pendapatan maupun penyerapan tenaga kerja.

Menurut Lubis (2012), peran pelabuhan perikanan yang dapat memberikan jasa-jasanya meliputi:

- a. Penanganan untuk mempertahankan mutu dan memberikan nilai tambah terhadap hasil tangkapan yang didaratkan.
- b. Mampu melakukan pembongkaran ikan secara cepat dan penyeleksian secara cermat.
- c. Mampu memasarkan ikan yang menguntungkan baik bagi nelayan maupun pedagang melalui aktivitas pelelangan.
- d. Mampu melakukan pendataan produksi hasil tangkapan yang didaratkan melalui sistem pendataan yang benar.

D. Operasional Pelabuhan Perikanan

Pengertian tentang operasional pelabuhan perikanan adalah tindakan atau gerakan sebagai pelaksana rencana yang telah dikembangkan untuk memanfaatkan fasilitas pada pelabuhan perikanan agar berdaya guna secara optimal bagi “fasilitas itu sendiri” atau fasilitas lainnya yang terkait” (Murdiyanto, 2004). Kegiatan operasional yang berlangsung di pelabuhan perikanan (Ngamel, 2005) adalah:

a. Pendaratan ikan

Pendaratan ikan di pelabuhan perikanan sebagian besar berasal dari kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapannya di pelabuhan itu, hanya kepelabuhan itu dengan menggunakan sarana transportasi darat.

b. Penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan

Sesuai dengan salah satu fungsinya sebagai tempat pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan, penanganan ikan segar dilakukan dengan metode pendinginan yang dapat dilakukan dengan es. Pengolahan ikan yang dimaksudkan untuk mempertahankan mutu sehingga waktu pemasaran menjadi lebih lama serta dapat meningkatkan nilai jual ikan, kegiatan pemasaran yang dilakukan di pelabuhan bersifat lokal, nasional, maupun ekspor.

c. Penyaluran perbekalan

Penjualan/pengisian perbekalan yang berkaitan dengan fasilitas pelabuhan saat ini adalah penjualan es, air bersih, penyaluran BBM dan suku cadang. Pelayanan perbekalan ini umumnya diadakan oleh pihak UPT pelabuhan, KUD, koperasi pegawai pelabuhan, BUMN dan pihak swasta.

Keberhasilan suatu kegiatan operasional pelabuhan perikanan tergantung pada kelancaran aktivitasnya mulai dari proses pendaratan hasil tangkapan, pelelangan, pengolahan hingga pemasaran hasil tangkapan (Afandy, 1998).

E. Fasilitas Pelabuhan Perikanan

Fasilitas pelabuhan perikanan meliputi fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas tambahan. Luas dan jumlah fasilitas yang dimiliki oleh suatu pelabuhan perikanan sangat tergantung kepada areal yang tersedia.

1. Fasilitas pokok.

Fasilitas pokok adalah fasilitas dasar yang wajib dimiliki pelabuhan guna untuk melayani kegiatan pendaratan ikan seperti pembongkaran hasil tangkapan dan pemuatan perbekalan untuk keperluan operasi penangkapan ikan. Fasilitas pokok juga berfungsi melindungi kegiatan di pelabuhan dari gangguan alam seperti ombak, arus dan pendangkalan kolam pelabuhan akibat sedimentasi. Fasilitas pokok antara lain: dermaga, penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur masuk keluar kapal.

a. Dermaga

Dermaga adalah bangunan yang biasa digunakan untuk bersandar kapal di suatu pelabuhan. Dermaga dalam kegiatan perikanan digunakan untuk membongkar hasil tangkapan, berlabuh dan mengisi perbekalan. Ditinjau dari posisinya dermaga dapat digolongkan ke dalam dua tipe, yaitu : 1). *wharf* atau *quay*, yaitu bentuk dermaga yang letaknya dekat atau sejajar dengan garis pantai, 2). *pier* atau *jetty*, yaitu dermaga yang bentuknya menjorok ke laut yang dapat berbentuk lurus, huruf T atau huruf L.

b. Kolam pelabuhan dan alur pelayaran

Kolam pelabuhan adalah bagian perairan yang menampung kegiatan kapal perikanan antara lain : berlabuh, bongkar muat, mengisi perbekalan dan memutar kapal. Dalam pembuatan kolam pelabuhan hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu :

- Memiliki luas yang dapat menampung seluruh kapal yang berlabuh dan masih memberikan ruang yang leluasa untuk bergerak bagi kapal,
- Lebarnya harus dapat dipergunakan bagi kapal yang berputar dengan bebas dalam gerak melingkar yang tidak terputus,
- Perairannya cukup dalam sehingga kapal terbesar masih mampu untuk berlabuh di saat air sedang surut,

- Tempatnya cukup terlindung dari angin, gelombang dan arus yang berbahaya.

Daerah memutar kapal (*turning basin*) di dalam kolam pelabuhan dapat mempunyai berbagai bentuk tergantung pada ukuran pelabuhan dan jumlah kapal yang akan berlabuh. Radius "*turning circle*" yang ideal adalah dua kali panjang kapal terbesar dan ukuran minimum radius adalah sama dengan panjang kapal terbesar. Untuk tetap amannya kapal melakukan pelayaran di dalam kolam pelabuhan maka kedalaman perairan harus cukup dalam untuk kapal terbesar dalam muatan penuh. Kedalaman perairan kolam pelabuhan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain : (1). draft kapal terbesar dengan muatan penuh yang menggunakan pelabuhan tersebut; (2). tinggi gelombang maksimum di dalam kolam pelabuhan ($H= 70$ cm); (3). Tinggi ayunan kapal yang berlayar (maksimum 30 cm); (4). "*Clearance*" sebagai pengaman antar lunas kapal (*keel*) dan dasar perairan. Nilai C berkisar 25 cm – 100 cm tergantung lunak atau kerasnya dasar perairan. Pada lokasi pendirian pelabuhan di mana kedalaman perairan tidak mencukupi, maka perlu dilakukan pengerukan.

Alur pelayaran, atau tempat masuk dan keluarnya kapal-kapal perikanan juga sangat penting keberadaannya. Alur pelayaran harus cukup lebar supaya kapal dapat berpapasan dengan aman, tetapi tidak boleh terlalu lebar karena akan mengakibatkan pengaruh gelombang ke dalam kolam pelabuhan akan menjadi besar.

c. Daratan pelabuhan.

Daratan pelabuhan adalah bagian darat yang menampung seluruh fasilitas pelabuhan, yang biasanya bagian darat ini dibatasi oleh air dan pagar pelabuhan. Luas daratan pelabuhan harus 2 – 4 kali luas seluruh fasilitas bilamana semuanya dibangun di atasnya.

Daratan pelabuhan harus berada pada ketinggian tertentu supaya tidak terendam air pada saat pasang tertinggi atau kena sapuan gelombang pada musim ombak. Ketinggian pelabuhan juga berhubungan dengan sistim drainage pelabuhan. Tinggi daratan pelabuhan sekurang-kurangnya 50 cm di atas pasang tertinggi, sedangkan dermaga dan pinggiran lainnya 50 – 70 cm di atas pasang air laut tertinggi tergantung pada tinggi gelombang di kolam pelabuhan tersebut.

d. Pemecah gelombang

Pada daerah di mana gelombang lautnya sangat tinggi maka sangat diperlukan untuk membangun pemecah gelombang (*break water*) yang fungsinya untuk melindungi kegiatan yang berlangsung di kolam pelabuhan. *Break water* sekaligus dapat membentuk kolam pelabuhan. Pemecah gelombang juga dapat berfungsi sebagai penahan sedimen dari sekitar pelabuhan.

2. Fasilitas fungsional

Fasilitas fungsional yang dikatakan juga suprastruktur adalah fasilitas yang berfungsi untuk meninggikan nilai guna dari fasilitas pokok sehingga dapat menunjang aktivitas pelabuhan perikanan. Fasilitas-fasilitas fungsional ini dikelompokkan antara lain untuk:

- a. Penanganan hasil tangkapan dan pemasarannya, yaitu :
 - Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - Fasilitas pemeliharaan dan pengolahan hasil tangkapan, seperti tempat penjemuran ikan dan gedung pengolahan;
 - Pabrik es dan gudang es;
 - Refrigerasi/fasilitas pendingin, seperti *cool room* dan *cold storage*; dan
 - Gedung-gedung pemasaran.
- b. Fasilitas pemeliharaan dan perbaikan armada dan alat penangkapan ikan, yaitu:
 - Lapangan perbaikan alat penangkapan ikan;
 - Ruangan mesin;
 - Tempat penjemuran alat penangkapan ikan;
 - Bengkel : fasilitas untuk memperbaiki mesin kapal;
 - *Slipways* : tempat untuk memperbaiki bagian lunas kapal;
 - Gudang jaring : tempat untuk penyimpanan jaring; dan
 - *Vessel lift* : fasilitas untuk mengangkat kapal dari kolam pelabuhan ke lapangan perbaikan kapal.
- c. Fasilitas perbekalan : tangki dan instalasi air minum, tangki bahan bakar.
- d. Fasilitas komunikasi : stasiun jaringan telepon, radio SSB.

3. Fasilitas penunjang

Fasilitas tambahan yaitu fasilitas yang secara tidak langsung dapat menaikkan peranan pelabuhan namun tidak dimasukkan ke dalam fasilitas fungsional. Fasilitas tambahan dapat berupa penginapan nelayan, mess operator, tempat perbaikan alat tangkap, perkantoran pengusaha perikanan, kantin, poliklinik dan tempat beribadah. Pelabuhan perikanan memiliki fasilitas sebagai berikut:

1. Fasilitas luar (*contour facilities*) antara lain : pemecah gelombang, penahan pasir (*sand groins*), dinding penopang (*retaining walls*), pintu masuk (*sluices*), tempat tambat (*locks*), dermaga (*levees*), *jetties*, tanggul (*seashore levees*), dan pembatas/dinding (*parapets*).
2. Fasilitas berlabuh (*mooring facilities*) antara lain: tempat tambat dermaga (*mooring quay*), tempat pendaratan, pelampung tambat (*mooring buoy*), dermaga apung (*floating piers*), tonggak tambatan (*bollards*), dan *slipways*.

3. Fasilitas di air (*water facilities*) antara lain: jalan keluar, tempat berlabuh, dan kolam Pelabuhan.
4. Fasilitas perhubungan (*transporting facilities*) antara lain: jalan, jembatan, navigasi, dan sebagainya.
5. Fasilitas darat (*land for fishing port facilities*) antara lain:
 - Fasilitas pemeliharaan kapal dan alat tangkap yang meliputi perbaikan alat tangkap, kapal dan mesin, tempat penjemuran alat tangkap.
 - Fasilitas suplai meliputi: suplai air dan bbm untuk kapal.
 - Fasilitas penyimpanan, penanganan dan pengolahan hasil tangkapan meliputi: tempat penjualan, pembekuan, pengeringan, pabrik es, dan lainnya,
 - Fasilitas komunikasi dan stasiun cuaca.
 - Fasilitas untuk awak kapal meliputi: penginapan, kamar mandi, poliklinik dan ruang pertemuan.
 - Fasilitas pengelolaan meliputi: kantor dan pos keamanan.

F. Pengembangan Pelabuhan Perikanan

Pengembangan suatu pelabuhan perikanan harus direncanakan sesuai dengan pola pengembangan yang telah ditentukan. Menurut Lubis (2012), pola pengembangan suatu pelabuhan perikanan adalah acuan awal mengembangkan suatu pelabuhan perikanan. Pola pengembangan pelabuhan perikanan diperlukan agar pembangunan dan operasionalnya sesuai dengan fungsi dan tujuan pengembangannya. Penyusunan pola pengembangan pelabuhan perikanan harus ada di dalam triptyque portuaire untuk pelabuhan perikanan, yakni keterkaitan antara aspek wilayah produksi (*foreland*), wilayah distribusi (*hinterland*) dan aspek pelabuhan perikanan (*fishing port*) agar fungsi dan tujuannya bisa dicapai.

Sesuai dengan fungsi-fungsi yang dimilikinya maka pola pengembangan pelabuhan harus dilakukan dengan konsepsi "*multi-base system*" yakni suatu sistem yang menyeluruh berdasarkan pengembangan wilayah yang dalam operasionalnya mencakup beberapa aspek produksi, pengolahan dan pemasaran hasil sampai pada aspek sosial ekonomi perikanan.

Sehubungan dengan hal itu maka pengembangan pelabuhan perikanan diarahkan sebagai pengembangan komunitas perikanan (*fisheries community development*) secara terpadu (Direktorat Jenderal Perikanan, 2000), yaitu:

- a. Pengembangan pelabuhan perikanan dengan segala sarana dan prasarana untuk meningkatkan usaha kegiatan perikanan (produksi, pengolahan, distribusi hasil perikanan), menunjang pertumbuhan industri-industri perikanan dan pada akhirnya menunjang pembangunan perikanan secara keseluruhan.

- b. Pengembangan masyarakat perikanan dengan penyediaan fasilitas untuk kegiatan operasional dan pembangunan perkampung nelayan untuk rumah tangga nelayan.
- c. Pembinaan sumberdaya manusia perikanan melalui peningkatan ketrampilan dan profesionalisme dengan program-program pelatihan maupun manajemen secara terarah.

Pelabuhan perikanan sebagai salah satu infrastruktur perekonomian dinilai memiliki arti yang strategis terhadap perkembangan wilayah jika keberadaannya bernilai signifikan dalam pertumbuhan wilayah (Direktorat Jenderal Perikanan, 2000). Potensi pelabuhan perikanan pada suatu kawasan pusat pertumbuhan ditentukan oleh:

- e. Potensi sumberdaya alam, manusia dan buatan yang mendukung perkembangannya (*potensi supply*)
- f. Aspek lokasi (*locational rent*)
- g. Aksesibilitas ke pasar (potensi permintaan).

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. PER.16/MEN/2006, pelabuhan perikanan mempunyai fungsi mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran. Fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya dapat berupa pelayanan sandar labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan, pelayanan bongkar muat, pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan, pemasaran dan distribusi ikan, pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan, pelaksana penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan, pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan, pelaksanaan kesyahbandaran, pelaksanaan fungsi karantina ikan, publikasi hasil riset kelautan dan perikanan, pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari dan pengendalian lingkungan.

Menurut Murdiyanto (2004) menyatakan bahwa Pelabuhan perikanan berperan sebagai penghubung kegiatan di fishing ground/operasi penangkapan ikan di laut dengan kegiatan yang ada di hinterland berupa penanganan/pengolahan hasil tangkapan, dan pengangkutan produk ikan yang didaratkan.

Selanjutnya menurut Kusyanto (2005), untuk menjamin harga ikan dapat menguntungkan nelayan kewajiban Pemerintah membantu nelayan dalam memasarkan ikan melalui sistem lelang. Maksud dari sistem lelang adalah membantu nelayan menjual ikan untuk mendapatkan harga yang optimal pada suatu tempat tertentu kepada sejumlah pembeli melalui cara lelang. Dilain pihak fungsi pembinaan mutu dan pengolahan dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah produk perikanan sehingga

akan menimbulkan dampak ganda baik terhadap pendapatan maupun penyerapan tenaga kerja.

Kondisi ini menunjukkan bahwa berbagai aktivitas dalam kegiatan perikanan bernilai untuk peningkatan kesejahteraan pekerja. Temuan ini sejalan bahwa aktivitas perikanan mampu menggerakkan perekonomian dan memenuhi kesejahteraan nelayan dan keluarganya (Rees *et al.*, 2013).

G. Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT)

Metode analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis tersebut didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Proses pengambilan keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan. Dengan demikian, perencana strategis harus menganalisis faktor-faktor strategi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi saat ini yang disebut analisis situasi. Model yang paling sering digunakan untuk analisis situasi adalah Analisis SWOT (Rangkuti, 2006).

Berdasarkan hubungan pada masing-masing komponen SWOT selanjutnya dilakukan strategi antara komponen SWOT yaitu S-O, W-O, S-T, dan W-T untuk menentukan gabungan dalam seluruh strategi antar komponen SWOT dalam bentuk matriks SWOT (Tabel 2). Menurut Rangkuti (2006), strategi yang dihasilkan merupakan suatu kondisi yang ada. Strategi tersebut mempunyai empat kemungkinan, yaitu:

1. Strategi SO: strategi ini memanfaatkan seluruh kekuatan (S) untuk merebut dan memanfaatkan peluang (O) sebesar-besarnya.
2. Strategi ST: strategi ini memanfaatkan kekuatan (S) yang dimiliki untuk mengatasi ancaman (T) yang ada.
3. Strategi WO: strategi ini bertujuan untuk memanfaatkan peluang (O) untuk meminimalisir kelemahan (W) yang ada.
4. Strategi WT: strategi yang diambil untuk meminimalkan kelemahan (W) yang ada serta menghindari ancaman yang ada (T).

Tabel 2. Matriks SWOT

| | | | |
|-----|-------------------|---|--|
| EFE | IFE | STRENGTHS (S) Menentukan 5-10 faktor-faktor kekuatan internal | WEAKNESS (W) Menentukan 5-10 faktor-faktor kelemahan internal |
| | OPPORTUNITIES (O) | STRATEGI (SO) Menghasilkan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan Peluang | STRATEGI (WO) Menghasilkan strategi yang meminimalkan kelemahan dengan memanfaatkan Peluang |
| | THREATS (T) | STRATEGI (ST) Menghasilkan strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman | STRATEGI (WT) Menghasilkan strategi meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman |

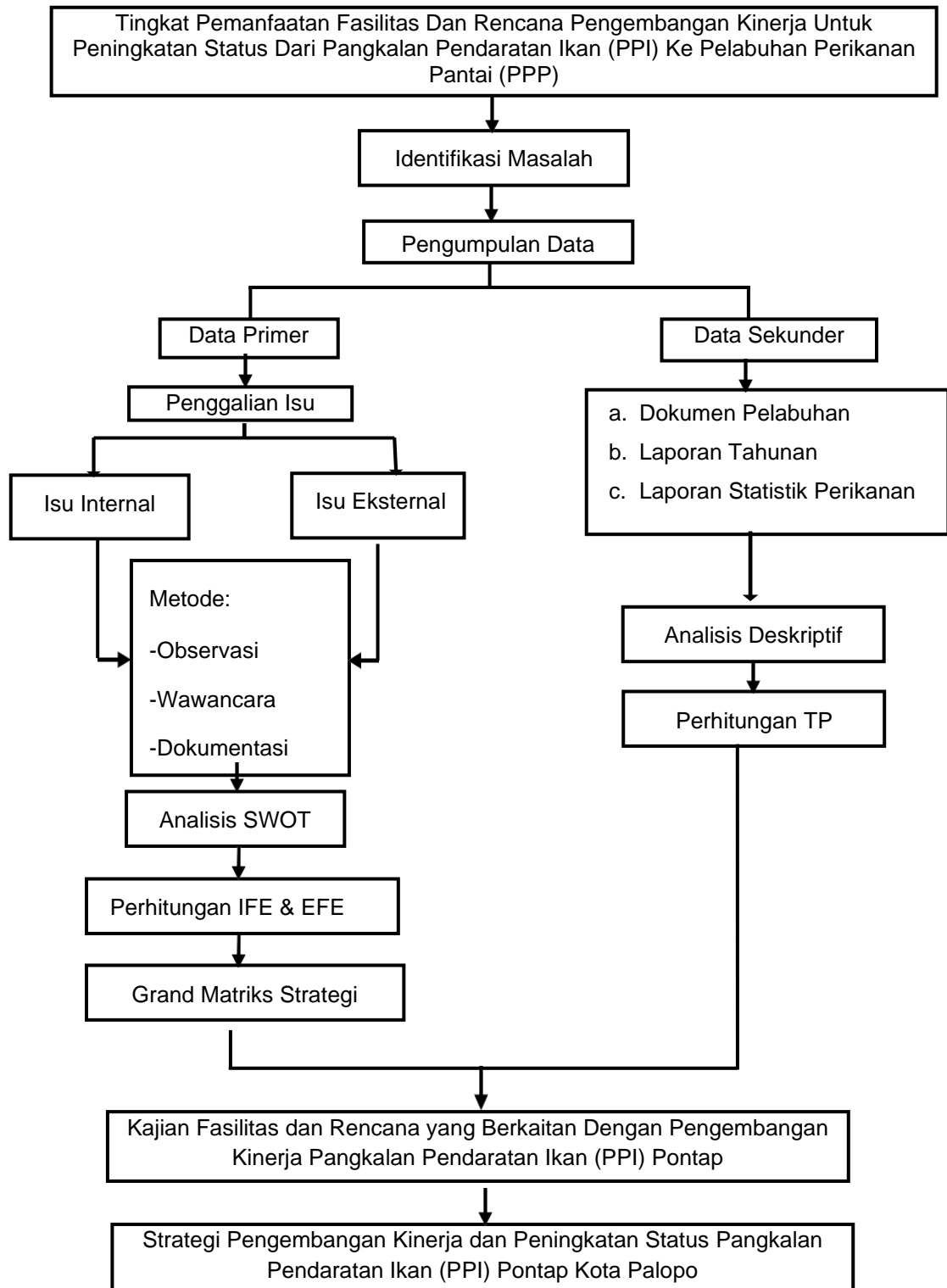
Keterangan: IFE (Internal Factor Evaluation) dan EFE (Eksternal Factor Evaluation).

Menurut Rangkuti (2006) semakin tinggi nilai total (bobot x rating) yang didapatkan dalam perhitungan maka kebijakan yang ditetapkan semakin tepat. Hal ini berarti, kebijakan tersebut dapat mengatasi kelemahan dan ancaman yang ada.

Sebaliknya, bila semakin kecil nilai total yang didapatkan, maka kebijakan yang dilaksanakan kemungkinan akan memberikan dampak yang tidak memuaskan bagi objek yang menjadi sasaran pelaksana kebijakan.

H. Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan penelitian diperlukan alur penelitian untuk mempermudah dalam pengumpulan data serta tidak mengalami kebingungan saat melakukan pengambilan data. Alur penelitian dijelaskan pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian.

I. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan studi pustaka, hingga saat ini penelitian yang secara khusus mengkaji tentang tingkat pemanfaatan fasilitas dan strategi pengembangan dan pengelolaan pangkalan pendaratan Ikan Pontap belum pernah dilakukan, penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis, ada beberapa penelitian dan Jurnal yang dapat dijadikan referensi dalam penulisan ini, antara lain:

1. Kondisi dan Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan Kronjo Kabupaten Tangerang Provinsi Banten (Devi *et al.*, 2018).
2. Analisis Strategi Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pasir Kabupaten Kebumen Ditinjau dari Sumberdaya Perikanan (Putri *et al.*, 2015).
3. Studi Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Kupang, Nusa Tenggara Timur (Reni *et al.*, 2021).
4. Studi Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan dalam Rangka Peningkatan Produksi Di Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Sumatera Utara (Yuspardianto, 2020).
5. Analisis Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kabupaten Rembang untuk Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (Hestyavida *et al.*, 2013).
6. Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Dasar dan Fungsional dalam Strategi Peningkatan Produksi Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kota Tegal Jawa Tengah (Yahya *et al.*, 2013)
7. Strategi Peningkatan Pemanfaatan Fasilitas Dasar dan Fungsional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal (Nurdyana *et al.*, 2013).
8. *Implementation Strategy Eco Fishing Port at the Hamadi Fish Landing Base (FLB), Jayapura City, Papua Province* (Manalu *et al.*, 2022).
9. Rancangan Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pelabuhanratu Terkait dengan Peningkatan Karakteristik Kelas Pelabuhan Perikanan Dan Pemilihan Jenis Kapal Penangkap Ikan (Iswadi *et al.*, 2016).
10. Strategi Pengembangan Fasilitas Pokok Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Beba Takalar Untuk Meningkatkan Fungsi Pelabuhan Perikanan (Fada, 2022).
11. Peningkatan Peran Partisipasi Swasta dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pelabuhan Tanjung Batu di Propinsi Bangka Belitung (Puriningsih, 2016).